

**PENGAWASAN DINAS SOSIAL DALAM PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN SUNGAI BERINGIN
KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI**

HILIR

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Memproleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.sos) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

REFTU RISMA JULIANTY

NIM. 12070522242

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2024

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Reftu Risma Julianty
NIM : 12070522242
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : Ilmu Administrasi Negara
JUDULSKRIPSI : Pengawasan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
TANGGAL UJIAN : RABU, 19 JUNI 2024

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING



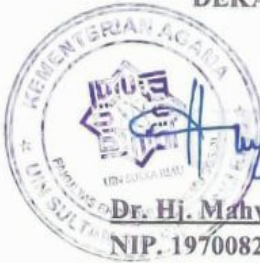
Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP.,M.Si

Nik. 130 717 057

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001



Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos.,M.Si
NIP.19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Reftu Risma Julianty
Nim : 12070522242
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judulskripsi : Pengawasan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
TanggalUjian : Rabu, 19 Juni 2024

Tim Penguji

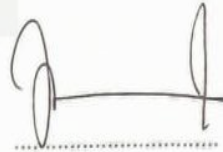
Ketua penguji
Dr. Mahmuzar, M. Hum
NIP. 19760426 200701 1 016



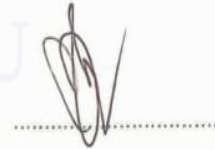
Pengujil
Dr. Mustiqowati Ummul F, M.Si
NIP. 19791127 200801 2 010



Pengujii
Ikhwani Ratna, M. Si
NIP. 19830827 201101 2 014



Sekretaris
Candra Jon Asmara, M. Si
NIP. 19760104 202321 1 001





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Refu Risma Julianty
 NIM : 12070522242
 Tempat/Tgl. Lahir : TEMBILAHAN, 29 JULI 2002
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA.

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengawasan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga
Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Beringin
Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri
Hiir.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

..... membuat pernyataan



Refu Risma Julianty

NIM : 12070522242

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Pengawasan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pemerian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragi Hilir

ABSTRAK

Oleh:

Reftu Risma Julianty

NIM. 12070522242

Pengawasan adalah proses yang melibatkan pemantauan dan evaluasi aktivitas atau kinerja untuk memastikan bahwa tujuan dan standar yang telah ditetapkan dapat tercapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) belum dapat dikatakan optimal. Karena dilihat dari 3 indikator semua aspek masih memiliki kekurangan terutama pada indikator pelaksanaan masih terdapat proses pendataan yang belum optimal, kurangnya ketegasan dan ketelitian dari pendamping saat proses verifikasi serta masih banyak masyarakat yang tidak jujur mengenai kondisi keluarganya hal ini yang membuat banyak penerima bantuan PKH tidak tepat sasaran. Faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH kurangnya sumber daya pendamping dan kurang kuatnya regulasi antara kelurahan dan dinas sosial. Saran penulis pengawasan pelaksanaan bantuan sosial program keluarga harapan perlu ditingkatkan lagi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan sumber daya pendamping perlu ditingkatkan serta perkuat lagi regulasi antara kelurahan dan dinas sosial.

Kata Kunci: Pengawasan, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial

Supervision of the Social Service in Implementing the Provision of Social Assistance for the Family Hope Program (PKH) in Sungai Beringin Village Tembilahan District Indragi Hilir Regency

ABSTRACK

By:

Reftu Risma Julianty

12070522242

Supervision is a process that involves monitoring and evaluating activities or performance to ensure that predetermined goals and standards can be achieved. The purpose of this study was to determine how the form of supervision carried out by the Social Service in the implementation of the provision of social assistance for the Family Hope Program (PKH) and to find out what are the inhibiting factors in the implementation of the provision of social assistance for the Family Hope Program (PKH) in Sungai Beringin Village, Tembilahan District, Indragiri Hilir Regency. The research method used in this research is qualitative descriptive method and data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of field research can be concluded that the Supervision of the Social Service in the implementation of the provision of social assistance for the Family Hope Program (PKH) cannot be said to be optimal. Because judging from the 3 indicators, all aspects still have shortcomings, especially in the implementation indicator, there is still a data collection process that is not optimal, the lack of assertiveness and thoroughness of the assistants during the verification process and there are still many people who are not honest about their family conditions, this is what makes many PKH beneficiaries not right on target. The inhibiting factor in the implementation of PKH is the lack of companion resources and the lack of strong regulations between the sub-district and the social service office. The author's suggestion is to supervise the implementation of the family hope program social assistance.

Keywords: Supervision, Family Hope Program, Social Assistance

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AlhamdulillahRobilli"alamiin, Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa dituturkan kepada junjungan alam, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menarik umat muslim keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang.

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul "**Pengawasan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**" sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (Sos) pada jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian skripsi ini, tentunya penulis memiliki keterbatasan ilmu dan pengetahuan, sehingga penulis dengan lapang dada dan hati yang terbuka lebar menerima berbagai masukan, kritik, dukungan dan bantuan akan penelitian ini di masa depan. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang peneliti sayangi. Terutama kepada kedua orang tua cinta pertama dan panutanku Bapak Rusdianto dan Ibunda Nita Royani, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namum beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab , M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara
4. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Afrizal, S.sos.,M.Si selaku Pembimbing Akademik yang sudah banyak memberikan arahan selama masa perkuliahan
6. Ibu Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing sekaligus dosen konsultasi yang sudah berdedikasi penuh dalam proses pengerjaan skripsi ini, yang selalu memberikan arahan serta masukan serta sering mendengarkan apa kendala yang dialami penulis
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang Bapak dan Ibu berikan, semoga menjadi bekal bagi penulis dan menjadi ladang pahala bagi Bapak dan Ibu sekalian.
8. Karyawan dan Karyawati Dosen Fakultas Ekonomi dan ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memberikan pelayanan kepada penulis dalam urusan administrasi di Kampus.

9. Kepada seluruh pegawai kantor Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Lurah Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan para informan penelitian yang telah memberikan izin untuk peneliti melakukan penelitian serta sudah dengan sangat baik menerima peneliti hingga peneliti mudah menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada saudara kandung saya terutama kakak saya Resti Rahmadani S.kep yang telah mendukung serta membantu penulis dalam kesulitan serta adik saya Refki Rina Agustian dan Ravia Destina yang menjadi penyemangat penulis
11. Kepada pemilik nama Erwin Harleyanda, yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan dan semangat serta meyakinkan kalau penulis bisa
12. Kepada Eka yolanda, Normaliza safitri, Elda Fatma Safitri yang memberikan semangat dan pembelajaran untuk skripsi ini serta terimakasih yang istimewa kepada Ririn Febryanti telah menjadi teman seperjuangan dari awal penulisan skripsi

Pekanbaru, 30 Mei 2024

Penulis,

Reftu Risma Julianty
NIM. 12070522242

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Pengawasan	15
1. Pengertian Pengawasan	15
2. Fungsi Pengawasan	17
3. Jenis-Jenis Pengawasan	18
4. Maksud dan Tujuan Pengawasan	22
5. Prinsip-prinsip Pengawasan	24
6. Syarat-syarat Menjalankan Pengawasan Yang Baik	24
7. Indikator Pengawasan	25
B. Program Keluarga Harapan	26
1. Pengertian Program Keluarga Harapan	26
2. Mekanisme Pendaftaran Calon Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	27
3. Tujuan Program Keluarga Harapan	29
4. Manfaat Program Keluarga Harapan	30
5. Kreteria Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.....	31
6. Syarat Penerima Program Keluarga Harapan	32
7. Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan	32
C. Pandangan Islam Tentang Pengawasan	33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Penelitian Terdahulu	35
E. Definisi Konsep	40
F. Konsep Operasional	41
G. Kerangka Berpikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Informan Penelitian	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisa Data	46
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir	49
B. Gambaran Umum Wilayah Sungai Beringin	49
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A. Pengawasan dinas sosial dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	61
B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	82
BAB VI PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Besaran Nominal Setiap Komponen Bantuan PKH	6
Tabel 1.2	Jumlah Penerima PKH di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	8
Tabel 1.3	Jumlah masyarakat yang terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	8
Tabel 1.4	Bentuk-bentuk Pengawasan Yang di Lakukan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan PKH	9
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 2.2	Konsep Operasional	41
Tabel 3.1	Informan Penelitian	45
Tabel 4.1	Daftar RT/RW Kelurahan Sungai Beringin	49
Tabel 4.2	Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sungai Beringin Tembilahan	50
Tabel 4.3	Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Sungai Beringin	52
Tabel 4.4	Sarana dan Prasarana Pendidikan	53
Tabel 4.5	Sarana dan Prasarana Kesehatan	54
Tabel 4.6	Sarana dan Prasarana Ibadah	54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir	43
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kelurahan Sungai Beringin	47



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. (Royat, 2015)

Menurut (Yacoub, 2012) dalam (ferezagia, 2018) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Menurut World Bank, 2004 salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan

biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Kemiskinan disebabkan oleh dua hal, yaitu sifat alami dan kebijakan pembangunan atau kebijakan pemerintah (Suwadi, 2014) dalam (Ni Made Oveta Annisya, 2023) Kemiskinan yang disebabkan oleh sifat alami artinya kemiskinan yang timbul akibat perilaku masyarakat seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan atau kebijakan pemerintah seperti pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak memperhatikan wilayah yang terpencil dan sulit untuk dijangkau, kebijakan pemerintah tidak memperhatikan usaha masyarakat yang masih berskala kecil, dan munculnya ketimpangan pembangunan antara wilayah desa dan kota.

Bagi masyarakat yang berada dalam kondisi miskin, mereka tidak dapat memenuhi kualitas hidup yang layak atau pun mencapai kesejahteraan sosial. Jika keadaan tersebut dibiarkan, maka akan memengaruhi kesehatan maupun pendidikan masyarakat tersebut. Pada bidang kesehatan, masyarakat dalam kondisi miskin menjadi rentan terhadap penyakit dan bagi ibu hamil berisiko kekurangan gizi yang akan berpengaruh kepada keadaan janin dan angka kelahiran bayi hidup. Sedangkan di bidang pendidikan, anak-anak dari keluarga miskin terancam tidak dapat melanjutkan sekolah atau pendidikan ke level yang lebih tinggi. (Ni Made Oveta Annisya, 2023)

Berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah



kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin yang disebut sebagai Bantuan Sosial atau (Bansos). Bansos ini dalam bentuk bantuan tunai maupun bantuan material. Bansos diantaranya adalah seperti dana BOS, Jamkesmas, PNPM-Mandiri, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan dan lain-lain. (Tety Thalib, 2020)

Kebijakan program Bantuan Sosial di Indonesia menjadi sangat penting, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban atau bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bantuan sosial adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos difokuskan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat agar terlepas dari permasalahan rantai kemiskinan yang berkepanjangan, mendorong dan mempercepat pertumbuhan masyarakat miskin menjadi masyarakat produktif, mandiri, sejahtera dengan memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan yang sudah ada. (Tety Thalib, 2020)

Pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi melakukan berbagai program perlindungan sosial yang bertujuan untuk menurunkan dan mengatasi kemiskinan, serta mendorong masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Salah satu program tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan dari tahun 2007. Program ini mengadopsi program perlindungan sosial

yang dirancang Bank Dunia untuk negara berkembang, dikenal dengan nama *Conditional Cash Transfers* (CCT). CCT telah berhasil diterapkan di beberapa negara seperti Brazil dan Meksiko untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian program ini menular ke beberapa negara lainnya, termasuk Indonesia yang mulai mengadopsinya sejak tahun 2007. (Ni Made Oveta Annisya, 2023)

Pelaksanaan PKH diatur melalui Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (BLTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan kelompok paling miskin. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH. Adapun program ini berupa bantuan tunai yang diberikan dalam 4 (empat) tahap selama 1 tahun sesuai dengan komponen peserta penerima.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 sebuah program bantuan sosial bersyarat Program Keluarga Harapan memiliki tujuan sebagai berikut:



- a. meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
- b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
- e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat

Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 pasal 3 Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Komponen Kesehatan
 - a. Ibu Hamil/nifas/menyusui
 - b. Anak berusia 0-6 tahun.
2. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen pendidikan yakni anak usia sekolah.

Anak usia sekolah yang dimaksud adalah seorang anak dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang



menempuh tingkat pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/Mts sederajat, dan SMA/MA sederajat.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial
 - a. Lanjut usia mulai dari 60 tahun
 - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Tabel 1.1
Besaran Nominal Setiap Komponen Bantuan PKH

No	Kategori	Nominal Rp/tahun
1	Ibu hamil/Nifas	3.000.000
2	Anak usia dini/Balita	3.000.000
3	Anak SD/Sederajat	900.000
4	Anak SMP/Sederajat	1.500.000
5	Anak SMA/Sederajat	2.000.000
6	Disabilitas Berat	2.400.000
7	Lansia	2.400.000

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa besaran bantuan PKH setiap kategorinya berbeda-beda. Dan pemerintah berharap setiap anggaran yang diberikan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial. Pelaksana PKH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

- a. jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain
- b. melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain
- c. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana

- d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH
- e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH dan
- f. melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota.

Di Kabupaten Indragiri Hilir PKH telah berjalan pada tahun 2014 Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan secara serentak untuk semua kecamatan se kabupaten INHIL yang mana terdapat 20 kecamatan, salah satunya kecamatan Tembilahan Kelurahan Sungai Beringin.

Secara administrasi Kelurahan Sungai Beringin terdiri dari 6 RW dan 32 RT dengan jumlah penduduk \pm 9,348 jiwa dan jumlah keluarga \pm 2.500 KK. Kepadatan penduduk \pm 430 jiwa per Km². Laju pertumbuhan penduduk 1,62% sector perdagangan 8,84% sector jasa 7,58% dan sector lainnya 26,03%. Angkatan kerja terbanyak di serap pada sector pertanian.

PKH di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ini banyak mendapatkan respon yang positif dan negatif dari masyarakat. Respon positif dari masyarakat Tembilahan yaitu mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan PKH dan beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka sedikit berkurang serta mereka juga menerima pengetahuan tentang kesehatan dan pentingnya pendidikan untuk keluarga mereka yang tidak mereka ketahui sebelumnya.

Adapun tanggapan negatif yang diberikan masyarakat terutama yang tidak mendapatkan bantuan PKH, yang mengatakan bahwa program ini tidak adil karena masih banyak masyarakat miskin lainnya tidak mendapatkan bantuan PKH



sementara seharusnya mereka juga berhak menerima bantuan dari pemerintah sehingga timbul kecemburuan.

Tabel 1.2
Jumlah Penerima PKH di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan
Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tahun	Jumlah
1	2021	111 KK
2	2022	118KK
3	2023	120 KK

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat jumlah masyarakat di Kelurahan Sungai Beringin yang menerima bantuan PKH pada tahun 2021 sebanyak 111 KK, pada tahun 2022 sebanyak 118 KK dan pada tahun 2023 sebanyak 120 KK. Dari tabel tersebut juga menunjukkan bahwa penerima PKH setiap tahunnya meningkat.

Tabel 1.3
Jumlah masyarakat yang terdaftar di DTKS (DataTerpadu Kesejahteraan Sosial) di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten
Indragiri Hilir

No	Tahun	Keluarga
1	2021	1.244
2	2022	1.250
3.	2023	1.255

Sumber: Kantor Lurah Sungai Beringin 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat jumlah keluarga yang berhak mendapatkan PKH di Kelurahan Sungai Beringin dan sudah terdaftar di DTKS Tahun 2021 sebanyak 1.244 Keluarga, Tahun 2022 sebanyak 1.250 Keluarga dan pada Tahun 2023 sebanyak 1.255 Keluarga.

Berdasarkan penelitian (Rahma Yulis 2022) mengatakan pengawasan PKH belum bisa dikatakan optimal sepenuhnya. Karena yang pertama, Kurangnya pemahaman penerima PKH dan masyarakat terkait proses pendataan. Yang kedua ketidakjujuran penerima PKH saat pendamping melakukan verifikasi pendataan dilapangan sehingga menyebabkan tidak tepat sasaran.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

Tabel 1.4
Bentuk-bentuk Pengawasan Yang di Lakukan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan PKH

No	Bentuk Pengawasan	Keterangan
1	Pemantauan Lapangan	Pendamping PKH melakukan kunjungan langsung rutin ke keluarga penerima manfaat untuk memastikan bahwa program dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2	Audit dan Verifikasi Data	Dilakukan secara berkala untuk memeriksa keakuratan data yang terkait dengan penerima manfaat, termasuk data keuangan
3	Evaluasi Pembinaan dan Pendampingan	Evaluasi terhadap efektivitas program pembinaan dan pendampingan yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat untuk mengukur dampak dan efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
4	Monitoring dan Evaluasi Program	Evaluasi ini membantu menilai apakah program mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
5	Pelaporan Rutin	penyusunan laporan rutin mengenai pelaksanaan program, termasuk capaian, kendala, dan rekomendasi perbaikan.

Pengawasan PKH bertujuan untuk memantau pelaksanaan PKH pada sisi masukan (input) dan keluaran (outputs). Program pengawasan akan mengidentifikasi berbagai hal yang muncul dalam pelaksanaa PKH sehingga memberi kesempatan kepada pelaksana program untuk melakukan perbaikan yang

diperlukan. Pengawasan yang dilakukan oleh pendamping PKH Kecamatan Tembilahan adalah saat pertemuan kelompok dilakukan, selain itu pendamping juga akan melakukan verifikasi data ke fasilitas kesehatan dan pendidikan yang bekerjasama dengan PKH. Berdasarkan buku pedoman umum PKH tahun 2021-2024, indikator dalam pengawasan pelaksanaan PKH terdiri dari indikator masukan (sumber daya maupun anggaran) dan indikator keluarga (produk yang dihasilkan). Kedua kategori ini akan diperoleh dari hasil analisis dan system informasi manajemen PKH. (Novy Arthamevia, 2022)

Dalam proses pemantauan Program Dinas Sosial mengawasi kinerja Pendamping PKH guna efektivitas sebuah program dengan cara rapat koordinasi dan evaluasi untuk setiap bulannya, Dimana jika terjadi permasalahan di lapangan maka Pendamping PKH akan membuat laporan Kepada Dinas Sosial lalu Dinas Sosial bersurat kepada Kementerian Sosial guna mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan PKH, monitoring atau pemantauan merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program PKH dilaksanakan. (Novy Arthamevia, 2022)

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan masyarakat penerima bantuan PKH karena selama ini banyak sekali orang mampu yang terdaftar namanya sedangkan yang tidak mampu tidak terdaftar hal inilah yang patut kitaawasi bersama-sama agar terciptanya masyarakat yang sejahtera karena program bantuan ini.

Penelitian ini di fokuskan kepada pengawasan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat sangat



miskin yang membutuhkan fasilitas kesehatan dan pendidikan. PKH ini harus dilakukan secara profesional sehingga tidak ada lagi rumah tangga sangat miskin yang tidak mendapatkan program bantuan Keluarga Harapan, seharusnya PKH ini benar benar memberikan bantuan kepada rumah tangga yang sangat membutuhkan sehingga adanya program PHK ini masyarakat merasa terbantu kehidupannya. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENGAWASAN DINAS SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN SUNGAI BERINGIN KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dinas sosial dalam pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan diatas maka tujuan peneliti yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan yang di lakukan dinas sosial dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial PKH di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?



2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat atau kendala pengawasan dinas sosial dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial PKH di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan berbagai macam manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah:

1. **Manfaat Teoritis**
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Program Keluarga Harapan Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
2. **Manfaat Praktis**
Hasil penelitian ini dapat masukan bagi masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang ada dan menambah wawasan dan pengetahuan penulis.
3. **Manfaat Akademis**
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Bagi peneliti lain dapat menjadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.



E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan rangkaian pembahasan secara sistematis sehingga kerangka skripsi menjadi jelas dan terstruktur, serta kajian penelitian tidak keluar dari pokok pembahasan penulis penelitian ini dibagi menjadi enam bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori, konsep operasional/variabel penelitian dan kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga dapat di tarik suatu hipotesa

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas penelitian, struktur organisasi, visi misi dan gambaran umum terkait objek penelitian

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan dinas sosial dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial di kelurahan sungai beringin kecamatan tembilahan kabupaten indragiri hilir

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari peneliti terkait penelitian yang diambil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.(Yahya, 2018)

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.(Kadarisman, 2018)

Dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau

diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Dalam konteks ini pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance*, dalam konteks membangun manajemen pemerintah publik yang bercirikan *good governance*, pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. (Dr.Rr. Herini Siti Aisyah, 2023)

Menurut George R. Terry mendefinisikan pengawasan "*control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with plan*" Terjemahan bebasnya, pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. (Anggersigit Pramukti, 2018)

Sementara itu menurut Sujamto adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilaikenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Sujamto ingin mengembalikan pengertian pengawasan ini kepada kata dasarnya dalam bahasa Indonesia, yaitu awas yang berarti "mampu mengetahui secara cermat dan seksama". Jadi tujuan pengawasan hanyalah untuk mengetahui secara cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi itu. Kata "yang semestinya" dalam pengertian di atas adalah tolok ukur yang mengandung tiga segi, yaitu : sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektifitas). (Anggriani, 2019)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari beberapa pengertian pengawasan yang diuraikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Selain itu pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein* dan *Das Sollen*. Dimana *Das Sollen* (rencana) harus sesuai *Das Sein* (kenyataan). (Anggersigit Pramukti, 2018)

2. Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi lancarnya kegiatan suatu organisasi. Pengawasan bisa menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah mereka tetapkan dapat berjalan secara mulus dan lancar sehingga organisasi bisa mencapai setiap sasaran yang telah diterapkannya.

Fungsi pengawasan yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi tentang perlunya disiplin, mematuhi segala peraturan dan keselamatan kerja bersama. Sosialisasi perlu dilakukan terus-menerus, karena usaha pencegahan sangat penting mendapatkan perhatian.

Pengawasan (*controlling*) sebagai fungsi manajemen bila dikerjakan dengan baik, akan menjamin bahwa semua tujuan dari setiap orang atau kelompok konsisten dengan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini membantu meyakinkan bahwa tujuan dan hasil tetap konsisten satu sama lain dengan tujuan organisasi. *Controlling* berperan juga dalam menjaga pemenuhan (kompliansi) aturan dan kebijakan yang esensial.



Sebagai kesimpulan, Fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Secara detail fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana manajemen untuk memberikan penilaian apakah pengawasan yang telah dilakukan oleh manajemen sudah dicukupi serta telah dikerjakan dengan efektif.
- b. Untuk memberikan penilaian apakah organisasi telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti yang telah dilaporkan oleh pelaksana tugas organisasi.
- c. Untuk memberikan penilaian apakah setiap bagian dari manajemen telah mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilakukan secara efektif dan efisien
- e. Untuk memastikan apakah tujuan organisasi telah tercapai atau tidak.

Jadi, fungsi pengawasan adalah untuk memberikan analisis, menilai, merekomendasikan, dan menyampaikan hasil laporan sehubungan dengan bidang pekerjaan organisasi yang telah diteliti

3. Jenis-Jenis Pengawasan

(Anggersigit Pramukti, 2018) Jenis pengawasan sendiri dapat dibagi dalam beberapa kategori, kategori tersebut diantaranya berdasar pola pemeriksaan,

berdasar waktu pelaksanaan, berdasar subjek yang melakukan pengawasan, berdasar cara pelaksanaannya serta waktu pelaksanaannya. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada pembahasan dibawah ini:

a. Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan

1. Pemeriksaan Oprasional

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Pemeriksaan menekankan padapenilaian dari sudut efesiensi dan kehematan.

2. Pemeriksaan Finansial

Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, peraturan, kepastian, instrukri yang bersangkutan dan seterusnya.

3. Pemeriksaan Program

Pemeriksaan yang dimaksud untuk menilai program secara keseluruhan, contoh: suatu program bantuan sosial PKH. Ditinjau dari segi efektivitasnya untuk mengetahui apakah tujuan semula telah ditentukan juga telah dicapai sertaapakah dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan alternatif yang wajar.

4. Pemeriksaan lengkap

Pemeriksaan yang mencakup tiga pemeriksaan diatas.



b. Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan

1 Pengawasan preventif

Pengawasan yang melalui *per audit* sebelum pekerjaan dimulai, contohnya adalah dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana perencanaan tenaga, dan sumber-sumber lain.

2 Pengawasan repsensif

Pengawasan yang dilaksanakan lewat *post audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

c. Jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang di pimpinnya.

2. Pengawasan fungsional

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti Inspektorat Jendral, Itwilprop, BPKP, dan Bapeka.

3. Pengawasan legislatif

Pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD).

4. Pengawasan masyarakat

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang termuat di media massa atau elektronik.

5. Pengawasan politik



Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politis.

d. Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya

1. Pengawasan langsung

Pengawasan yang digelar di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, pengawas legislatif, pengawas masyarakat.

e. Jenis pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaan

1. Sebelum kegiatan

Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, dan penetapan petunjuk operasional.

2. Selama kegiatan

Pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, dengan membandingkan antara rencana dan hasil. Pemeriksaan apakah semuanya telah sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Tujuan pengawasan ini untuk mengoreksi atas kesalahan-kesalahan yang terjadi hingga bersifat repressif

f. Dari sisi objek yang diawasi

1. Pengawasan khusus



Penngawasan yang dilakukan yang dilakukan berkaitan dengan keunngan dan pembangunan negara.

2. Pengawasan umum

Pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan

4. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab pada setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Sitomorang dan Juhir (1994) dalam (Dr. Titik Triwulan T., 2018) maksud pengawasan adalah untuk:

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- 2) Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbul lagi masalah yang baru.
- 3) Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
- 4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standar.

Rachman juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:



- 1) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan renkontruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.
- 2) Agar terselenggaeanya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.
- 3) Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan anjuran agama.

Lebih lanjut situmorang dan juhir (1994) dalam (Dr.Titik Triwulan T., 2018)mengemukakan bahwa secara langsung tujuan pengawasan adalah untuk:

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebikajaksanaan, dan pemerintah.
- 2) Menertibkan kordinasi kegiatan-kegiatan.
- 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- 4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan.
- 5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarno dalam (Dr.Titik Triwulan T., 2018)adalah: Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien



atau tidak, dan mencari jalan keluar ternyata dijumpai kesulitan, kelemahan, atau kegagalan kearah perbaikan.

5. Prinsip-prinsip Pengawasan

Untuk mendapatkan sesuatu sistem pengawasan yang efektif dan sesuai dengan standar pengawasan kinerja sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai, perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan M. Manulang (2004:173) dalam (Rusyan, 2022) mengemukakan bahwa suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Dapat merefleksasikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang diawasi.
- b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
- c. Fleksibel.
- d. Dapat merefleksasikan pola masyarakat.
- e. Ekonomis.
- f. Dapat dimengerti.
- g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

6. Syarat-syarat Menjalankan Pengawasan Yang Baik

(Dr. H.A Syamsul Mulhayat, 2023)Beberapa syarat untuk menjalankan pengawasan yang baik antara lain adalah:

- a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan pemerintah
- b. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera
- c. Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan

- d. Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan
- e. Pengawasan harus luwes dan fleksibel
- f. Pengawasan harus sesuai dengan pola organisasi
- g. Pengawasan harus ekonomis
- h. Pengawasan harus mudah di mengerti
- i. Pengawasan harus di ikuti dengan perbaikan atau koresi

7. Indikator Pengawasan

Menurut Handayani (2013:56) dalam (Raja Maruli Tua Sitorus, 2020), ada beberapa indikator pengawasan yang sangat penting, yakni:

a. Pengamatan

Pengamatan adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

b. Inpeksi langsung dan rutin

Inpeksi teratur dan langsung merupakan salah satu alat kontrol manajemen yang bersifat klasik tapi masih sangat relevan dan secara luas sudah banyak di terapkan dalam upaya menemukan masalah yang dihadapi dilapangan termasuk untuk memperkirakan besarnya resiko.

c. Pelaporan lisan dan tertulis

Suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggung jawaban baik secara lisan maupun tertulis dari bawahan

kepadaatasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada diantara mereka.

d. Evaluasi Pelaksanaan

Suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan dan menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan.

e. Diskusi antara manajer dan bawahan

Pertukaran pendapat dan gagasan dalam bentuk lisan untuk mencari sebuah solusi dari sebuah masalah dan mendapat kesepakatan antaraatasan dan bawahan.

B. Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut PKH adalah salah satu program perlindungan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah berkontribusi dalam menekankan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bansos, yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH bertujuan membuka akses KPM bagi ibu hamil dan anak usia dini dalam memanfaatkan fasilitas/layanan kesehatan (faskes) dan anak usia sekolah dalam memanfaatkan fasilitas/layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di tempat tinggal mereka. Manfaat PKH saat ini juga diarahkan untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tujuan untuk mempertahankan kesejahteraan sosial mereka.

Selain mendorong KPM untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, KPM PKH juga di dampingi untuk mendapatkan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi *center of excellence* dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

2. Mekanisme Pendaftaran Calon Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan

Proses pendaftaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia melibatkan beberapa langkah penting. Berikut adalah alur pendaftarannya:

1. Pendataan Awal
 - a. Calon peserta PKH diidentifikasi oleh petugas pendataan dari Kementerian Sosial melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)
 - b. Data ini biasanya diperoleh dari survei atau sensus yang dilakukan oleh pemerintah
2. Verifikasi Data
 - a. Data yang telah dikumpulkan kemudian diverifikasi untuk memastikan bahwa calon peserta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan

- b. Proses verifikasi ini dilakukan oleh petugas di tingkat kecamatan atau desa
3. Sosialisasi dan Pemberitahuan
 - a. Setelah data terverifikasi, calon peserta yang memenuhi syarat akan diinformasikan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh petugas PKH di tingkat kecamatan atau desa
 - b. Calon peserta akan menerima undangan untuk mengikuti sosialisasi program
4. Pendaftaran dan Validasi
 - a. Calon peserta yang diundang harus datang ke lokasi yang telah ditentukan untuk melakukan pendaftaran dan validasi data
 - b. Mereka harus membawa dokumen-dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan dokumen lainnya yang relevan
5. Pembukaan Rekening Bank
 - a. Peserta yang telah terdaftar akan dibantu untuk membuka rekening bank, karena bantuan PKH disalurkan melalui rekening bank
 - b. Bank yang terlibat dalam penyaluran bantuan PKH biasanya adalah bank-bank milik pemerintah (Himbara)
6. Pencairan Dana
 - a. Setelah rekening dibuka, dana bantuan PKH akan dicairkan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial
 - b. Peserta dapat mengambil bantuan tersebut melalui ATM atau agen bank yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Pendampingan dan Monitoring

- a. Peserta PKH akan mendapatkan pendampingan dari petugas pendamping PKH untuk memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai dengan tujuan, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga
- b. Petugas pendamping juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan dengan baik dan tepat sasaran

3. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs). Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 pasal 2 PKH bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

4. Manfaat Program Keluarga Harapan

- 1) Mengurangi Kemiskinan: PKH bertujuan utama untuk mengurangi kemiskinan. Dengan memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan atau miskin, program ini membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perawatan kesehatan.
- 2) Meningkatkan Akses Pendidikan: Program ini mendorong keluarga penerima untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah. Kondisionalitas seperti ini membantu meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak yang sebelumnya mungkin tidak dapat bersekolah.
- 3) Meningkatkan Kesehatan: PKH juga mendorong keluarga penerima untuk mengikuti program imunisasi dan kesehatan lainnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan status kesehatan anggota keluarga, terutama anak-anak dan ibu hamil.
- 4) Pemberdayaan Ekonomi: Selain memberikan bantuan tunai, program ini juga menyediakan pelatihan keterampilan dan pendampingan untuk membantu keluarga penerima membangun usaha kecil atau meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Ini dapat membantu mereka menciptakan sumber pendapatan tambahan.
- 5) Peningkatan Kualitas Hidup: Dengan mengurangi beban ekonomi dan memberikan akses lebih baik ke layanan pendidikan dan kesehatan, PKH dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima. Mereka dapat



mengakses perawatan kesehatan yang lebih baik dan memberikan peluang pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak mereka.

- 6) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial: Program ini juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat. Dengan mengurangi tingkat kemiskinan, PKH dapat membantu mengurangi disparitas sosial dan meningkatkan keadilan sosial.

5. Kreteria Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kreteria dengan rincian berikut:

1. Komponen Kesehatan

a. Ibu hamil/nifas/menyusui

Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi atau berada dalam masa menyusui.

b. Anak Usia Dini

Anak Usia Dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak di hitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.

2. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud adalah seorang anak dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh

tingkat pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/Mts sederajat, dan SMA/MA sederajat.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

a. Lanjut Usia

Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga

b. Penyandang Disabilitas Berat

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasinya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

5. Syarat Penerima Program Keluarga Harapan

1. Ibu Hamil : Maksimal kehamilan kedua (tidak lebih)
2. Anak usia dini : Maksimal dua anak dalam satu keluarga
3. Anak usia sekolah SD : Maksimal satu anak dalam satu keluarga
4. Anak usia sekolah SMP : Maksimal satu anak dalam satu keluarga
5. Anak usia sekolah SMA : Maksimal satu anak dalam satu keluarga
6. Lanjut usia atau lansia : Maksimal satu orang dalam keluarga
7. Penyandang disabilitas : Maksimal satu orang dalam keluarga

6. Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan

Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik



komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini dikemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan. Berikut besaran bantuan sosial dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ibu hamil: Rp 3.000.000
- b. Anak usia dini/Balita: Rp 3.000.000
- c. Anak usia sekolah dasar/SD: Rp 900.000
- d. Anak usia sekolah SMP: Rp 1.500.000
- e. Anak usia sekolah SMA: Rp 2.000.000
- f. Lanjut usia atau lansia: Rp 2.400.000
- g. Penyandang disabilitas: Rp 2.400.000

C. Pandangan Islam Tentang Pengawasan

Pengawasan di dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan kata ar-Riqobah. Didalam al-Qur'an, kata ini disebutkan pada beberapa ayat yang secara umum menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah Swt. Ayat-ayat tersebut diantaranya adalah:

1. QS. An-Nisa [4]: 1

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."

Allah memerintahkan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran sebagai bagian dari fardu kifayah. Adanya pengawasan internal akan menjauhkannya dari berbagai bentuk penyimpangan serta dapat menuntunnya untuk tetap konsisten dalam melaksanakan setiap aktivitasnya dengan berpegang teguh pada hukum-hukum dan syariat Allah.

2. QS. Asy-Syura [42]: 6

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

Artinya: "Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; adapun engkau (Muhammad) bukanlah orang yang disertai mengawasimereka."

Berdasarkan penjelasan ayat dan definisi diatas, maka hakikat controlling atau pengawasan dalam Islam mempunyai karakteristik antara lain: pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga Allah Swt, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. Dalam konteks organisasi, ar-riqobah atau pengawasan merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilaksanakan, karena pengawasan merupakan pengecekan jalannya planning dalam organisasi untuk menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk. Mengenai faktor ini, al-Qur'an memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang bersifat merugikan tidak terjadi. Tekanan al-Qur'an lebih dahulu pada intropeksi dan evaluasi diri dari pribadi seorang pemimpin apakah sudah sejalan dengan pola dan tingkah berdasarkan Splaning dan program yang telah dirumuskan semula. (Wicahyaningtyas, 2022)

Dengan demikian, pada hakikatnya pengawasan pada umat islam tanpa disadari ternyata setiap manusia telah didampingi oleh dua malaikat (Raqib dan A`tid) yang mengawasi perbuatan manusia dan mencatat segala perbuatan manusia dan akan di pertanggungjawabkan oleh setiap manusia di hadapan Allah SWT.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Slamet Agus Purwanto, Sumartono dan M.Makmur	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)	implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto mulai seluruh rangkaian atau proses kegiatan mulai dari sosialisasi awal, refleksi kemiskinan, pelaksanaan program, monitoring program semuanya hampir berjalan dengan lancar, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mojosari mampu untuk merubah pola pikir masyarakat desa, yang semula mereka tidak begitu memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak,	Perbedaannya adalah dalam fokus penelitian pada penelitian ini berfokus pada implementasi atau menerapkan dari PKH di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Sedangkan penelitian saat ini adalah fokusnya terhadap bagaimana pengawasan Dinas Sosial Kecamatan Sungai Beringin Kabupaten Indragiri Hilir dari penerapan PKH



			dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) RTSM sudah mulai aktif dan mulai sadar akan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak mereka guna menatap masa depan yang lebih baik.	
2.	Claudio Usman (2014)	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo	hasil penelitian ini berhasil menguji hipotesis yaitu efektivitas program keluarga harapan berpengaruh positif dan signifikan dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.	Perbedaannya adalah dalam penelitian ini Claudio Usman menggunakan penelitian yang bersifat kuantitatif yaitu memberikan keterangan dengan angka statistik terhadap faktor efektivitas dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka
3.	Ronald Wilson Seran, Ida Ariyani dan Heriyani (2023)	Pengaruh Motivasi Kerja, Kompensasi dan Kopetensi Terhadap Kinerja Yang Dimediasi Kepuasan Kerja Pendamping Sosial Program Keluarga	Hasil penelitian ini kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Pendamping Sosial PKH di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini menjalankan tugas hanya sebagai rutinitas sehari-hari tanpa motivasi yang	Perbedaannya dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif digambarkan sebagai teknik penelitian berbasis positif yang digunakan untuk mengeksplorasi populasi atau sampel tertentu,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



		Harapan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	besar dengan Kompensasi, Kompetensi mengakibatkan rendahnya kepuasan kerja menjadikan Pendamping Sosial PKH di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini memiliki kinerja yang kurang terutama dalam hal tugas pelayanan terhadap masyarakat	mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan penelitian, dan kemudian menganalisis data tersebut secara kuantitatif dan statistik untuk mengevaluasi hipotesis yang sudah ada sebelumnya dan subjek penelitian ini adalah para pendamping PKH di Provinsi NTT. Sedangkan dalam penelitian saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif data yang di kumpulkan berupa kata kata dan gambar dan subjek penelitian saat ini adalah pengawasan dinas sosial terhadap PKH di Kelurahan Sungai Beringin Kabupaten Indragiri Hilir
4.	Siswati saragi, Maria Ulfa Batoe Bara, Nur AmbiaArma (2021)	Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kota Rintang Kecamatan Hampan Perak	Hasil penelitian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, baik pada aspek kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial telah berjalan dengan baik. Karena setiap bulannya selalu diadakan pertemuan untuk upaya membimbing peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun setiap	Perbedaanya adalah pada penelitian ini fokusnya lebih mengenai bagaimana pelaksanaan PKH di Desa Kota Rintang Kecamatan Hampan Perak, sedangkan penelitian saat ini fokusnya membahas mengenai pengeawasan dari pelaksanaan PKH di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>pertemuan tidak dihadiri oleh seluruh peserta, namun dapat bergantian pada pertemuan berikutnya. Adanya bantuan PKH telah berdampak baik kepada masyarakat Desa Kota Rantang, Namun Berdasarkan syarat miskin dengan kondisi kelayakan rumah, peserta PKH Desa Kota Rantang sebenarnya tidak layak karena telah membangun rumah yang layak. Akan tetapi berdasarkan jumlah penghasilan keluarga, peserta PKH layak mendapatkan bantuan PKH khususnya selama pandemi banyak masyarakat terdampak kehilangan pekerjaan.</p>	Hilir
5	Nuraida (2019)	Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sicalak Kabupaten Subang	<p>Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cicalak Kabupaten Subang sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Program dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cicalak Kabupaten 	<p>Perbedaanya pada penelitan ini membahas mengenai apakah pelaksanaan PKH di Kecamatan Sicalak Kabupaten Subang sudah efektif atau belum. Sedangkan pada penelitian sekarang membahas mengenai bagaimana pengawasan yang di lakukan DINSOS di kelurahan sungai beringin</p>

		<p>Subang masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memahami hak dan kewajibannya hal ini dapat dilihat dari kehadiran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di fasilitas Pendidikan dan fasilitas kesehatan. (19% Keluarga Penerima Manfaat tidak memahami hak dan kewajibannya)</p> <p>2. Tepat sasaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang belum berjalan efektif, karena belum semua masyarakat miskin menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), 72% masyarakat miskin belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).</p> <p>3. Tepat waktu dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang belum berjalan efektif, masih terdapat Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak</p>	
--	--	--	--

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



		<p>melaksanakan sosialisasi Peningkatan Kemampuan Keluarga satu bulan sekali.</p> <p>4. Perubahan nyata dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kabupaten Subang bisa dikatakan efektif, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan, terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.</p>	
--	--	---	--

E. Definisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secaraabstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dan ilmu sosial.

1. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penangan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi

Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

3. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.

F. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk mengatur penelitian yang dapat diukur dari gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut.

Tabel 2.2
Konsep Operasional

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Pengawasan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dinas Social Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Pelaksanaan	a. Pendataan keluarga penerima Manfaat (KPM) b. Verifikasi KPM c. Sasaran Penerima
	Mekanisme Penyaluran	a. Besaran Bantuan PKH b. Waktu Penyaluran
	Melakukan Evaluasi	a. Laporan Hasil PKH b. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga dari aspek Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan c. Mengurangi beban pengeluaran d. Bimbingan Untuk Pendamping

Sumber: Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 201

G. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif, dengan maksud ingin memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang Pengawasan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Moleong (2017:6) dalam (Iwan Hermawan, 2019) Menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan proposal ini peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan melihatnya banyak fenomena terkait masalah pengawasan PKH yang tidak tepat sasaran. Penelitian ini dilaksanakan pada 08 Januari 2024 sampai selesai.

C. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Data Primer

Menurut Arikunto (2013) dalam (Jose Beno, 2022) Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

- b. Menurut Sugiyono, (2018) dalam (Jose Beno, 2022) menyatakan bahwa data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku referensi, jurnal penelitian, internet dan lain – lain.

D. Informan Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penentuan subjek penelitian ini, penulis menggunakan analisis individu dan organisasi sebagai satuan yang diperhitungkan dalam subjek penelitian. (Mochamad Nashrullah, 2023)

Menetapkan subjek dalam suatu penelitian merupakan salah satu bagian yang utama, dengan harapan agar tercapai tujuan serta terjamin kualitas isi dari suatu penelitian (Bowen, 2019). Pendapat tersebut menjadi alasan bahwa subyek penelitian adalah sumber data utama dalam penelitian, yaitu bagian yang mempunyai data yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti (Ansori, 2015) dalam (Mochamad Nashrullah, 2023)

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah Informan
1.	Kepala Bidang Jaminan Sosial	1
2.	Koordinator PKH Kab. Inhil	1
3.	Pendamping PKH	1
4.	Masyarakat Penerima PKH	4
5.	Masyarakat Non-Penerima PKH	4
Jumlah		11

Sumber: Data Olahan 2024

E. Teknik Pengumpulan Data

A. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis yang dilakukan dengan pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2019). Dengan metode observasi diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metode lain.

B. Wawancara

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2019), Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

C. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan/ cara melihat, mempelajari, kemudian mencatat data yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Menurut (Sugiyono, 2019), bahwa metode dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau fariabel yang berupa data, catatan-catatan, surat kabar, transkrip, buku-buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dari pengertian diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa metode dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menyelidiki buku-buku catatan resmi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data menurut (Sugiyono, 2019), adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif, artinya data diperoleh dari dokumen berupa jawaban atau keterangan bukan berupaangka-angka. Menurut (Sugiyono, 2019), teknik analisa data sebagai berikut:

1. *Reduksi Data* (memilah data)

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Display data merupakan proses menampilkan data cara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, tabel, matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

3. *Verifikasi/Conclusion Data* (verifikasi/Penarikan simpulan)

Mengambil kesimpulan merupakan proses penarikan intisari dari data-data yang terkumpul kedalam bentuk pernyataan kalimat yang tepat dan memiliki data yang jelas. Penarikan kesimpulan bisa jadi diawali dengan kesimpulan yang belum sempurna. Setelah data yang masuk terus-menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya akhirnya didapatkan kesimpulan akhir yang lebih bermakna dan lebih jelas.



Kesimpulan adalah istilah dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat akhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berfikir induktif dan deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

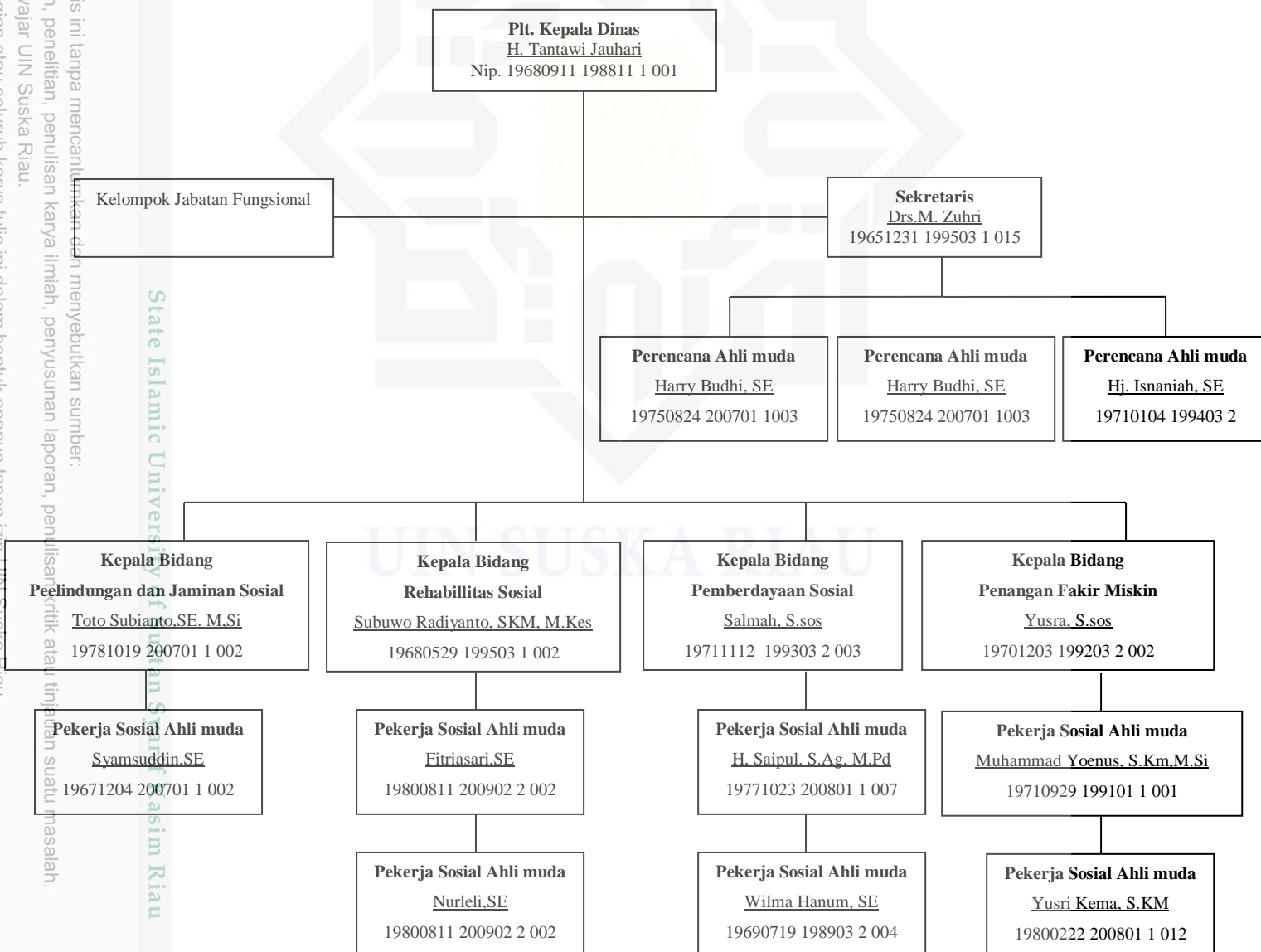
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir tersaji pada Gambar 4.1 struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir



Susunan organisasi dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subkoordinator Subtansi Perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 - c. Subkoordinator Subtansi Keuangan dan Perlengkapan
3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Subkoordinator Subtansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - b. Subkoordinator Subtansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - c. Subkoordinator Subtansi Jaminan Sosial Keluarga
4. Kepala Bidang Rehabilitas Sosial
 - a. Subkoordinator Substansi Rehabilitas Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - b. Subkoordinator Substansi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas
 - c. Subkoordinator Substansi Rehabilitas Sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO)
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
 - a. Subkoordinator Substansi Pemberdayaan Sosial Perseorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 - b. Subkoordinator Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Izin Sumbangan
 - c. Subkoordinator Substansi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial



6. Kepala Bidang Penangan Fakir Miskin

- a. Subkoordinator Substansi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
- b. Subkoordinator Substansi Pendamping dan pemberdayaan
- c. Subkoordinator Substansi Pengelolaan, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial

1. Sumber daya aparatur Dinas Sosial

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 68 orang. Dimana yang terdiri 35 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 28 Tenaga Kontrak/Honorer, 3 keamanan kantor (*security*) dan 2 orang *Cleanis Servise (CS)*. Gambaran kompetensi aparat Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan formal serta pendidikan dan pelatihan struktural

2. Visi Misi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

Visi: Terwujudnya dinas kesejahteraan sosial kabupaten indragiri hilir sebagai pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang berdasarkan kesadaran, kesetiakawanan, tanggung jawab dan panti sosial

Misi:

1. Mewujudkan dan/informasi bidang kesejahteraan sosial yang lengkap dan akurat
2. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan bidang kesejahteraan sosial yang transparan dan kondusif



3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas bidang kesejahteraan sosial yang profesional
4. Mewujudkan pengawasan dan pengendalian pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara efektif dan efisien

B. Gambaran Umum Wilayah Sungai Beringin

Kelurahan sungai beringin merupakan salah satu Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Sungai Beringin terhampar di bagian utara kecamatan tembilahan dengan luas wilayah 20,72 (Km²) atau 1,893 Ha, dengan ketinggian 0,3 M di atas permukaan laut yang di penuh pasang surut air laut, baik secara langsung maupun tidak langsung, kelurahan Sungai Beringin terdiri dari rawa dan gambut, beriklim tropis basah dengan curah hujan dan haji hujan pertahun antara 1,575-2,292 mm dan 102-104 hari, dan suhu rata-rata 27 Oc, serta kelembaban udara antara 80-90%.

Secara administrasi Kelurahan Sungai Beringinterdiri dari 6 RW dan 32 RT dengan jumlah penduduk \pm 9,348 jiwa dan jumlah keluarga \pm 2.500 KK. Kepadatan penduduk \pm 430 jiwa per Km². Laju pertumbuhan penduduk 1,62% sector perdagangan 8,84% sector jasa 7,58% dan sector lainnya 26,03%. Angkatan kerja terbanyak di serap pada sector pertanian, jam kerja antara 35-44 jsm perminggu.

Batas-batas kelurahan sungai beringin kecamatan tembilahan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Sungai Batang Tuaka
- 2) Sebelah Selatan : Kelurahan Tembilahan Hilir



3) Sebelah Timur : Kelurahan Sungai Perak

4) Sebelah Barat : Kelurahan Tembilahan Kota

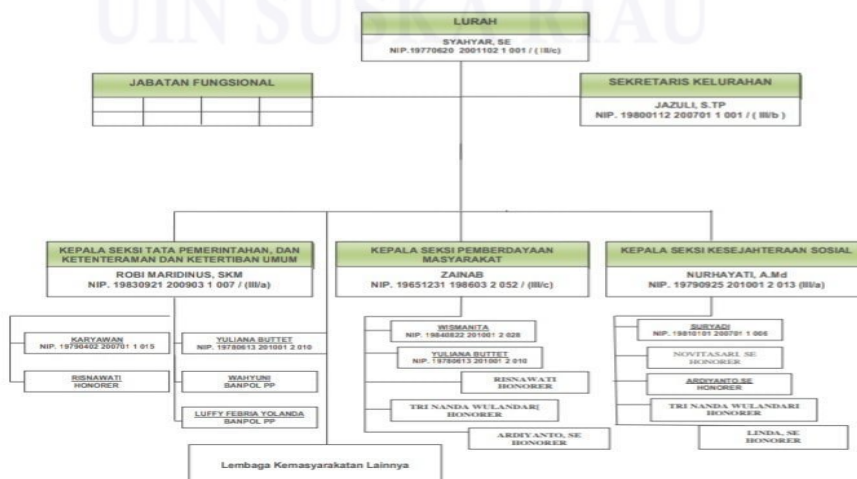
1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 1 (satu) orang Lurah dengan membawahi 1 (satu) orang Sekretaris Kelurahan dan 3 (Tiga) orang Kepala Seksi atau Kasi, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Lurah
- b. Sekretariat Kelurahan
- c. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Seksi Pembedayaan Masyarakat
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Lebih jelas struktur organisasi kelurahan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kelurahan Sungai Beringin



2. Ruang Lingkup Pemerintahan Sungai Beringin

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan telah terbentuk lembaga tingkat Kelurahan yang berfungsi untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan, sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di Kelurahan Sungai Beringin yakni Rukun Tetangga (RT) berjumlah 32 dan Rukun Warga (RW) berjumlah 6 yakni :



Tabel 4.1
Daftar RT/RW Kelurahan Sungai Beringin

No	Nama RT/RW	RT/RW	Alamat
	H.Abd Wahid	1	Jln. Tanjung Harapan
1.	Ismail	1	Jln. Tanjung Harapan
2.	Rubama	2	Jln. Tanjung Harapan
3.	Tarnizi	3	Jln. Tanjung Harapan
4.	Edy Suyanto		Jln. Tanjung Harapan
5.	Abdul Rasyid		Jln. Tanjung Harapan
6.	Aries Mulyadi		Jln. Tanjung Harapan
	Supardi S.Pd	2	-
1.	Rais S.pd	1	Jln. Tanjung Harapan
2.	Sudarta	2	Jln. Lingkar lr.H. Raya
3.	H.M.Thamir	3	Jln. Lingkar
4.	Dufly	4	Jln. Tanjung Harapan
5.	Ridwan Mahlan S.T	5	Jln. Tanjung Harapan
6.	H. Zulfahri S.H	6	Jln. Tanjung Sari
7.	Zaswadi	7	Jln. Tanjung Harapan
	Rusyidi	3	-
1.	Syahwani	1	Jln. Baharudin Yusuf
2.	Sai Andri	2	Jln.Lingkar Jadi
3.	M. Agung Alena Latif	3	Jln. Baharudin Yusuf
4.	Jarkasik	4	Jln. Stadion
	H. Abd Hamid	4	-
1.	Marhadi, S.pd	1	Jln. Sungai Beringin
2.	Erhamsyah AS	2	Jln. Sungai Beringin
3.	Jirniyadi	3	Jln. Kalimantan
4.	M. Sulong	4	Jln. Raja Ali Haji
5.	Edi	5	Jln. Amuntai
6.	Yurnalis	6	Jln. Papadaan
	H. Kurdiansyah	5	-
1.	Yusuf	1	Jln. Sungai Beringin
2.	Makhyudin, S.E	2	Jln. Prumnas H. Amir
3.	Herna	3	Jln. Kuala Getel
4.	Syamsul	4	Jln. Inpres
	H.M.Aini	6	-
1.	Ahmad Sadri	1	Jln. SKB
2.	Musa	2	Jln. Sungai Beringin
3.	H.Aripuddin	3	Jln. SKB Lr. Family
4.	Harmasnan	4	Jln. Pembangunan
5.	Harminsyah S.H	5	Jln. Pembangunan ujung

(*): Bolt = Ketua Rw

Sumber: Kantor Lurah Sungai Beringin 2024

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang terbentuk adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Maksud pembentukan lembaga kemasyarakatan adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong, menumbuh kembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan sesuai dengan Peraturan Lurah Sungai Beringin :

Tabel 4.2
Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kelurahan Sungai Beringin Tembilahan

No	Nama	Jabatan
1.	Ridwan Awie	Ketua LPM
2.	-	Wakil Ketua
3.	Makhyuddin, S.E	Sekretaris
4.	Tri Nanda Wulandari	Bendahara

Sumber: Kantor Lurah Sungai Beringin 2024

3. Kependudukan

a) Jumlah Penduduk

Penduduk Asli Daerah Indragiri Hilir adalah Suku Melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di Daerah Riau lainnya. Suku Melayu di Daerah ini juga

mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat Parental dan Beragama Islam. Hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari Daerah Asalnya ke Daerah ini yang merupakan satu Kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang yang ada di Wilayah Kelurahan Sungai Beringin. Penduduk Kecamatan Tembilahan disamping suku Melayu (asli) antara lain :

1. Suku Banjar
2. Suku Bugis
3. Suku Jawa
4. Suku Batak
5. Suku Minang
6. Suku Madura
7. Suku Tionghoa
8. Suku Melayu

Jumlah penduduk Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan berdasarkan registrasi penduduk sebanyak 10.000 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 5.876 jiwa dan perempuan 4.615 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 2.553 KK Pada umumnya mempunyai mata pencaharian dibidang Jasa, Perdagangan, Aparatur dan sebagian lainnya bergerak dibidang perkebunan, Perdagangan dan Kerajinan Industri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b) Mata Pencaharian Pokok

Masyarakat Kelurahan Sungai Beringin pada umumnya mempunyai pekerjaan sebagaimana Daftar di bawah ini :

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Sungai Beringin

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani/Pekebun	453 Orang
2.	Nelayan/Perikanan	26 Orang
3.	PNS	32 Orang
4.	TNI	9 Orang
5.	POLRI	12 Orang
6.	Pedagang	60 Orang
7.	Karyawan Honorer	157 Orang
8.	Buruh Harian Lepas	210 Orang
9.	Pembantu Rumah Tangga	25 Orang

Sumber: Kantor Lurah Sungai Beringin 2024

4. Pendidikan

Pekembangan dan kemajuan yang mungkin dicapai oleh umat manusia berpusat pada persoalan pendidikan. Perkembangan dan kondisi pendidikan sangat berdampak bagi perkembangan kehidupan ekonomi. Dengan tingkat dan kualitas pendidikan yang memadai, seseorang akan memiliki peluang dan kemampuan usaha yang memadai pula dan pada gilirannya akan memperoleh penghasilan ekonomi yang lebih baik.

Dalam rangka upaya peningkatan pembangunan disegala bidang, maka perlu didukung kualitas sumber daya manusia yang tinggi, baik aparatur pemerintah maupun seluruh warga masyarakat, sebagai tolak ukur peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya dibidang pendidikan masyarakat Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan dilihat dari sarana pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.4
Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	5
2	Sekolah Dasar (SD)	6
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
5	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2
Jumlah		15

Sumber: Kantor Lurah Sungai Beringin 2024

Berdasarkan data sarana dan prasarana pendidikan pada tabel di atas bahwa di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 5 unit Taman Sekolah Kanak-kanak, 6 unit Sekolah Dasar (SD), 1 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 unit Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 2 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

5. Kesehatan

Pembangunan kesehatan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hal ini terlihat semakin bertambahnya jumlah sarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan paramedis serta meningkatnya tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakit Pemerintah. Keterbatasan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan menciptakan bagian yang harus diprioritaskan khususnya kelompok yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan.

Dari sarana kesehatan yang terdapat di kelurahan Sungai Beringin dilihat sebagaimana tabel berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.5
Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1	Puskesmas Pembantu	1
2	Posyandu	9
Jumlah		10

Sumber: Kantor Lurah Sungai Beringin 2024

Berdasarkan sarana dan prasarana kesehatan pada tabel diatas bahwa di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 1 unit puskesmas pembantu dan 9 unit posyandu.

6. Agama

Secara demografis, masyarakat Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan adalah masyarakat yang sangat intens dengan nuansa kultural religius Islami, bahkan sampai pada tingkat fanatisme. Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, tanpa menafikan keberadaan agama minoritas lainnya. Heterogenitas etnis dan budaya secara sosial dapat dipersatukan oleh homogenitas agama, yaitu Islam.

Tabel 4.6
Sarana dan Prasarana Ibadah

No	Sarana dan Prasarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	10
2	Surau	14
3	Gereja	1
Jumlah		25

Sumber: Kantor Lurah Sungai Beringin 2024

Berdasarkan sarana dan prasarana ibadah pada tabel diatas bahwa di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 10 unit masjid, 14 unit surau dan 1 unit gereja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikaukan dilapangan terkait dengan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan menunjukan hasil yang belum optimal karena dilihat dari beberapa indikator pelaksanaan, penyaluran dan evaluasi masi ada terdapat beberapa permasalahan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan, yaitu pada saat peroses pendataan masi banyak masyarakat tidak mengetahuinya dan pada saat proses pelaksanaan verifikasi KPM kurangnya ketegasan dan ketelitian pendamping PKH serta dalam pelaksanaan PKH masi banyak terdapat penerima PKH yang tidak jujur mengenai kondisinya terlebih lagi kurangnya kesadaran PKH bahwa dirinya mampu dan tidak layak untuk mendapatkan PKH hal ini yang mengakibatkan pelaksanaan bantuan PKH belum optimal dan terjadi tidak tepat sasaran penerima bantuan PKH. Dalam penyaluran bantuan PKH tidak ada dampingan dari pendamping padahal dalam hal ini peran pendamping sangat diperlukan agar dapat mengarahkan kepada KPM uang yang telah diberikan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan juga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses penyaluran dan dalam melakukan evaluasi melalui laporan hasil pelaksanaan PKH belum optimal karena ada keterbatasan data sulit untuk mengumpulkan data yang akurat dan lengkap tentang pelaksanaan PKH karena dalam laporan PKH berisi mengenai data penting KPM PKH terutama lagi pada daerah yang sulit dijangkau

Terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan bantuan sosial Progrma Keluarga Harapan. Yang pertama kurangnya sumber daya pendamping sehingga pendamping tidak bisa melakukan secara rutin mengunjungi rumah peserta PKH untuk mengetahui dan mengecek kebenaran data sehingga masi ada yang tidak tepat sasaran. Yang kedua kurangnya sosialisasi mengenai PKH sehingga masyarakat belum sepenuhnya paham mengenai bantuan PKH. Yang ketiga kurang kuatnya regulasi antara kelurahan dan dinas sosial dalam pelaksanaan PKH sehingga pendamping kurang terbantu untuk mengeluarkan KPM yang sudah masuk kategori mampu.

B. Saran

Pengawasan pelaksanaan bantuan sosial Program Keluarga Harapan perlu di tingkatkan lagi untuk meminialisir terjadinya kesalahan dan sumber daya pendamping juga perlu ditingkatkan sehingga pendamping bisa optimal dalam melakukan pengecekan dan kebenaran data KPM sehingga tidakada lagi terjadi tidak tepat sasaran serta perkuat lagi regulasi antara kelurahan dan dinas sosial agar pendamping terbantu dalam pelaksanaan PKH ini untuk mengeluarkan KPM yang sudah dalam kategori mampu.





Al'quran

Qs. An-Nisa: 1

Qs. Asy-Syura: 6

Buku

Anggersigit Pramukti, S. d. (2018). *pengawasan hukum terhadap aparatur negara*. jakarta: media pressindo.

Anggriani, D. H. (2019). *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Perraturan Daerah*. jakarta: Universitas Tama Jagakarsa.

Bowen, S. (2019). *Metode Penelitian*. Jakarta: Third Edition.

Dr. H.A Syamsul Mulhayat, S. (2023). *Hakikat Hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. jakarta: Penerbit adab.

Dr. H.A Syamsul Mulhayat, S. (2023). *Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: CV. Adanu Abimata.

Dr.Rahmawati Sururama, S. (2020). *Pengawasan Pemerintah*. Bandung: Cendekia Press.

Dr.Rr. Herini Siti Aisyah, S. (2023). *Sistem Pengawasan Keuangan Negara*. jakarta: Cv.Jakad Media Publishing.

Dr.Titik Triwulan T., S. (2018). *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Iwan Hermawan, S. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. jl. Cilombang 2 Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.

Kadarisman, M. (2018). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* . Jakarta: Rajawali.

Raja Maruli Tua Sitorus, S. (2020). *Pengaruh komunikasi antarpribadi pimpinan terhadap motivasi kerja*. jakarta: scopindo media pustaka.

RI, D. J. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan* . Jakarta: Kementrian Sosial RI.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rusyan, H. T. (2022). *Membangun Efektivitas kinerja Kepala Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.

Yahya, Y. (2018). *Pengantar Manajemen*. JAKARTA: GRAHA ILMU

Jurnal

ferezagia, d. v. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. Dalam Yacoub, *Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat* (hal. 2). Jakarta.

Jose Beno, A. P. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (PERSERO Cabang Teluk Bayur). *Prosedur Penelitian*, hal. 120-121.

Mochamad Nashrullah, O. M. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan. Dalam Ansori, *Pengertian Subjek dan Objek Penelitian* (hal. 49). Jakarta.

Ni Made Oveta Annisya, A. N. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. *Jurnal Wacana Kinerja*, 2.

Novy Arthamevia, H. S. (2022). Analysis of the Family Hope Program: Analisis Program Keluarga Harapan. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 8/10.

Royat, S. (2015). *Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Menko Kesra Bidang Koordinasi Pengurangan Kemiskinan.

Slamet Agus Purwanto, S. ., (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Wacana*, 93-94.

Tety Thalib, A. Y. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 40.

Wicahyaningtyas, M. (2022). Controlling Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist. *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 33-35.

Regulasi

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 *Tentang Program Keluarga Harapan*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

